

DETERMINAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Verawaty¹, Septiani Fransisca², Richa Rahmawati³
Universitas Bina Darma

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 3 Palembang

Sur-el: verawaty@binadarma.ac.id¹, septiani.fransisca@binadarma.ac.id²,
rahmawatiricha@yahoo.co.id³

Abstract: *This research was aimed to test the effect of local own source revenue (PAD), general allocation fund, special allocation of fund, revenue-sharing fund, other legitimate income as the determinants to the level of local financial independence in South Sumatra. Data was obtained from the budget realization report from 2013-2014. Determination of samples was 17 local governments in South Sumatra. The data were secondary data obtained from Central Agency on Statistics (BPS). The results showed that PAD had significant positive effect on the level of local financial independence. The general allocation fund, revenue-sharing fund, and other legitimate income had significant negative effect on the level of local financial independence. The special allocation fund got the negative effect but not significant on the level of local financial independence.*

Keywords: *The level of local financial independence, PAD, general allocation fund, special allocation fund, revenue-sharing, other legitimate income.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, lain-lain pendapatan yang sah sebagai determinan tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Selatan. Data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran dari tahun 2013-2014. Penetapan sampel ditetapkan dengan teknik total sampling sebanyak 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah..*

Kata Kunci: *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Lain-Lain Pendapatan yang Sah.*

1. PENDAHULUAN

Tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini kaya akan

sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Fenomena mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat yang dapat dilihat dari aspek keuangan. Ketergantungan terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat.

Terkait dalam hal ini (Muliana, 2009) dengan objek pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Siagian (2014) menyatakan DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan PAD dan DBH tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Riau. Adapun Marizka (2013) dengan objek pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat menunjukkan bahwa bahwa PAD berpengaruh signifikan positif dan DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian Tahar dan Zakhiya (2011) dengan objek 56 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian daerah, sedangkan DAU berpengaruh signifikan negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah sementara PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya masih tidak konsisten sehingga perlu dilakukan kembali penelitian. Selain PAD dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), peneliti menambahkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagai faktor penentu (determinan). Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebagai determinan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam

membayai pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa laporan realisasi anggaran yang diperoleh Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Sumatera Selatan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan kriteria sampel, yaitu kabupaten/kota yang memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai variabel-variabel yang diteliti, hanya ada sebelas kabupaten dan empat kota.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis kuantitatif. Pemilihan teknik ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

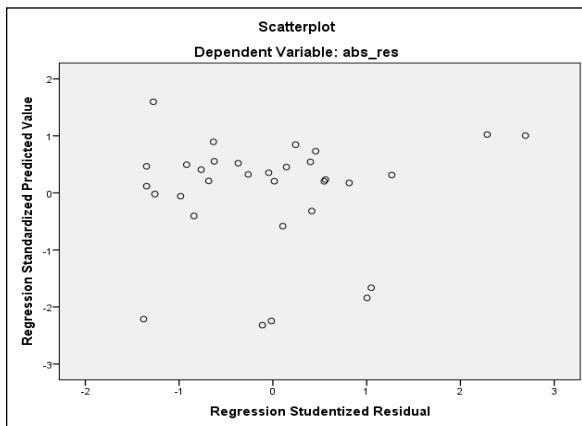
Penelitian ini menghasilkan beberapa uji, yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas), uji koefisien determinasi, uji signifikansi parsial, dan uji signifikansi simultan.

Hasil uji normalitas menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,082 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p = 0,200 > 0,05$). Hal ini berarti H_0 diterima yang mengatakan bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual berdistribusi normal. Dengan demikian telah terpenuhi asumsi normalitas dan bisa dilakukan pengujian asumsi klasik berikutnya pada data. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00532696
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.064
	Negatif	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji Heterokedastisitas menghasilkan uji scatterplot dan glejser. Uji scatterplot menghasilkan grafik scatterplot yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak terlihat terdapat pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.



Gambar 1. Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 2, dapat dilihat bahwa pada tabel Coefficients^a nilai sig. semua variabel independen lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Dengan demikian terpenuhilah asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Glejser

Model	Sig.
1 (Constant)	.251
Pendapatan asli daerah	.807
Dana alokasi umum	.776
Dana alokasi khusus	.776
Dana bagi hasil	.265
Pendapatan lain-lain yang sah	.317

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 2, dapat dilihat bahwa pada tabel Coefficients^a nilai sig. semua variabel independen lebih besar dari 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Dengan demikian terpenuhilah asumsi klasik untuk uji heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* adalah 2,400 dengan signifikansi 5 % jumlah unit analisis 32 (n) dan variabel independen (k=5), di dapat nilai dL 1,1092 dan dU 1,8187. Oleh karena nilai Dw lebih besar dari dU dan kurang dari 4-dL ($4 - 1,1092 = 2,8908$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model, sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Hasil uji kerolasi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.977 ^a	.954	.945	.00582	2.400

Uji multikolinearitas dalam penelitian diperlukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara variabel independen dalam penelitian. Untuk menguji terjadi atau tidak gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF atau *Variance Inflating Factor* dari hasil analisis regresi. Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinearitas yang tinggi. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Dari hasil pengujian multikolinearitas, dapat dilihat bahwa angka tolerance PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4) dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah (X5) > 0,10. Hasil perhitungan tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel independen.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
pendapatan asli daerah	.804	1.244
dana alokasi umum	.289	3.463
dana alokasi khusus	.639	1.564
dana bagi hasil	.150	6.664
pendapatan lain-lain yang sah	.149	6.696

Tabel 5 menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,945 yang memiliki arti bahwa 94,5% perubahan tingkat kemandirian keuangan dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, sedangkan sisanya 5,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977 ^a	.954	.945	.00582

Berdasarkan hasil pengolahan data dari tabel 6 yang terlihat pada kolom *unstandardized coefficients* bagian B, diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,029 + 0,1297X_1 - 0,038X_2 + 0,015X_3 - 0,036X_4 - 0,032X_5$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemandirian Keuangan; X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD); X2 = Dana Alokasi Umum (DAU); X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK); X4 = Dana Bagi Hasil (DBH); X5 = Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Adapun interpretasi dari persamaan di atas adalah:

- 1) Konstanta sebesar 0,029 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel rasio PAD, DAU, DAK, DBH, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah maka tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,029.
- 2) Koefisien X1 (b_1) = 0,1297 menunjukkan bahwa rasio PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika PAD ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,1297.

- 3) Koefisien X2 (b_2) = -0,038 menunjukkan bahwa rasio DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika DAU ditingkatkan maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar -0,038.
- 4) Koefisien X3 (b_3) = 0,015 menunjukkan bahwa rasio DAK berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika DAK ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,015.
- 5) Koefisien X4 (b_4) = -0,036 menunjukkan bahwa rasio DBH berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika DBH ditingkatkan maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar -0,036.
- 6) Koefisien X5 (b_5) = -0,032 menunjukkan bahwa rasio pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya jika pendapatan lain-lain yang sah ditingkatkan maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar -0,032.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.029	.017		1.772	.088
PAD	1.297	.065	.962	20.035	.000
DAU	-.038	.018	-.246	-2.072	.048
DAK	.015	.054	.015	.275	.786
DBH	-.036	.016	-.260	-2.266	.032
Lain-lain pendapatan yang sah	-.032	.017	-.282	-1.854	.075

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 106,819 dengan nilai signifikan

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kemandirian keuangan atau dapat dikatakan variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu tingkat kemandirian keuangan.

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.018	5	.004	106.819	.000 ^b
Residual	.001	26	.000		
Total	.019	31			

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis terkait PAD dan tingkat kemandirian adalah bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Hasil uji regresi (Uji T) penelitian ini membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi 5%), sedangkan t hitung 20,035 > dari t tabel 2,0369. Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Fitriyanti (2009), Muliana (2009), Apriana dan Suryanto (2010), Tahar dan Zakhya (2011), serta Marizka (2013). Akan tetapi analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Siagian (2014) yang menyatakan bahwa PAD tidak memiliki

pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali di daerah tersebut digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari tabel Uji T yang telah dilakukan membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki dan akan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian PAD merupakan determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

3.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis terkait DAU dan tingkat kemandirian adalah bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Berdasarkan hasil uji t sebelumnya, penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan dengan nilai signifikansi 0,048 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi 5%), sedangkan t hitung -

2,072 < dari t tabel 2,0369. Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Muliana (2009), Ariani (2010), Tahar dan Zakhiya (2011), yang menyatakan DAU memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Akan tetapi analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Siagian (2014) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan dan Marizka (2013) yang bahkan menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU juga dialokasikan kepada daerah tanpa memperhatikan jumlah belanja yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi DAU maka akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Alasan DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan karena DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun terlalu besar sehingga dapat memberikan dampak ketidakmandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya. Dengan demikian DAK merupakan determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

3.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis terkait DAK dan tingkat kemandirian adalah bahwa DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Berdasarkan hasil uji t sebelumnya penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (tidak berpengaruh signifikan negatif) terhadap tingkat kemandirian keuangan. Dengan nilai signifikansi 0,786 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (tingkat signifikansi 10%), sedangkan t hitung $0,275 <$ dari t tabel 2,0369. Akan tetapi analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Muliana (2009), Marizka (2013) dan Siagian (2014) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, DAK merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Berdasarkan tabel Uji T yang telah dilakukan membuktikan DAK tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai

dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prasarana pemerintahan kelautan dan perikanan. Pemerintah pusat memberikan DAK dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mensejahterakan masyarakat misalnya dengan menambah jumlah guru di kabupaten yang masih memerlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menambah akses layanan umum seperti rumah sakit dan menambah jumlah dokter untuk kabupaten yang masih kekurangan tenaga medis. Hal ini sesuai prioritas nasional (pusat). Dengan demikian DAU bukan merupakan determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

3.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis terkait DBH dan tingkat kemandirian adalah bahwa DBH berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Berdasarkan hasil uji t sebelumnya penelitian ini membuktikan bahwa DBH berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Dengan nilai signifikan 0,032 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi 10%), sedangkan t hitung $-2,266 <$ dari t tabel 2,0369. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Marizka (2013) dan Siagian (2014) yang menyatakan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh signifikan (tidak berpengaruh signifikan negatif) terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Berdasarkan tabel Uji T yang dilakukan telah membuktikan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhannya. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran. Dengan demikian hipotesis DBH berpengaruh negatif terhadap pengalokasian tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian DBH merupakan determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

3.2.5 Pengaruh Lain-Lain Pendapatan yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Hipotesis terkait Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan tingkat kemandirian adalah bahwa faktor ini berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Berdasarkan hasil uji t sebelumnya penelitian ini membuktikan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan negatif (tidak berpengaruh positif) terhadap tingkat kemandirian keuangan. Dengan nilai signifikan

0,075 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,10 (tingkat signifikansi 10%), sedangkan t hitung $-1,854 <$ dari t tabel 2,0369. Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Pendapatan yang lainnya ini terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan tabel Uji T yang dilakukan telah membuktikan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian. Lain-lain pendapatan yang merupakan pendapatan yang didapat dari pemerintah pusat ataupun instansi lain apabila suatu daerah mengalami kekurangan biaya, atau mengalami musibah bencana. Jadi apabila daerah yang memiliki dana yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah maka daerah tersebut belum dapat dikatakan mandiri. Maka dari itu Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian lain-lain pendapatan yang sah bukan merupakan determinan tingkat kemandirian keuangan daerah pada penelitian ini.

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa secara simultan atau serempak variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah karena dari hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 106.819 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi 5%), maka hipotesis alternatif

diterima yang berarti semua determinan pada penelitian ini berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

4. SIMPULAN

Hasil pengujian antara PAD dan tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Pemerintah kabupaten/kota akan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota mampu memenuhi kebutuhan untuk mendanai kegiatan pemerintahan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa penerimaan PAD yang jumlahnya besar sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian antara DAU dan tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun terlalu besar sehingga tidak dapat memberikan dampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian antara DAK dan tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAK tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer yang diperuntukkan untuk

kepentingan khusus akan berpengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian antara DBH dan tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa secara parsial variabel DBH berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhannya sehingga menunjukkan bahwa penerimaan DBH dari pemerintah pusat yang jumlahnya besar berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian antara variabel Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa secara parsial variabel Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang banyak menerima dana hibah yang besar dapat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak jumlah sampel, memperluas periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun, dan menambahkan variabel-variabel lainnya. Dapat dilihat dari adjusted R^2 hanya sebesar 94,5% yang berarti ada 5,5% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lainnya untuk menjelaskan tingkat kemandirian keuangan, seperti PDRB, Jumlah Penduduk, dan Sumber Daya Alam.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriana, Dina & Suryanto, Rudi. 2010. *Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se-Jawa-Bali)*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 11 No. 1, Hal. 68-79.
- Ariani, Kurnia Rina. 2010. *Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Keresidenan Surakarta)*. Skripsi FE Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Fitriyanti, Ismi Rizki. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kota, Kabupaten dan Provinsi DIY)*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMY, Yogyakarta.
- Marizka, Reza. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat*. Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Padang Fakultas Ekonomi, Padang.
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- Siagian, Nurmince Sartika. 2014. *Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*. Skripsi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan bisnis, Medan.
- Tahar, Afrizal & Zakhiya, Maulidya. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1, hal 88-99.